



RKPD NON APBD

Inovasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim

*Disampaikan oleh : Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, M.M.
Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim*

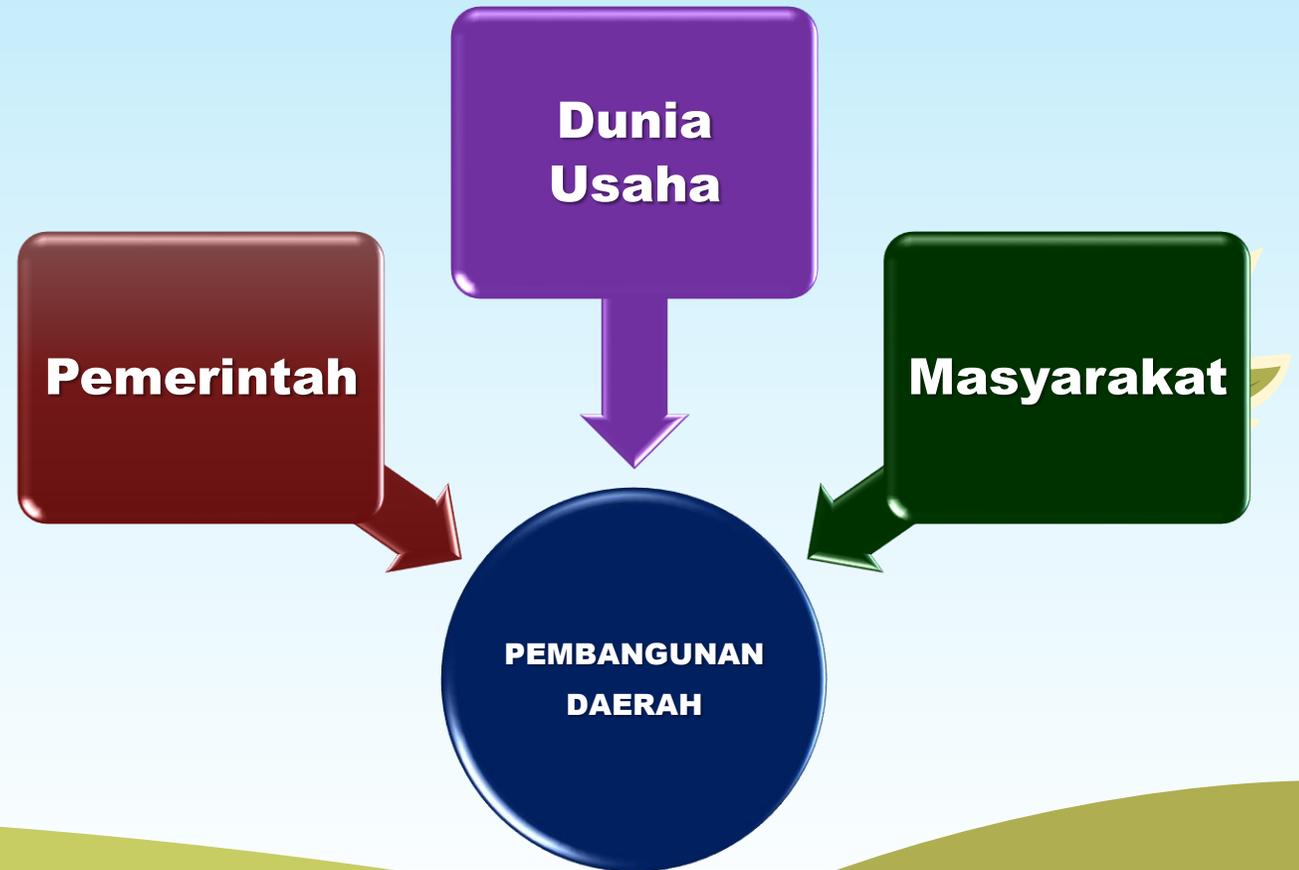
Dalam acara : Pasar Ide dan Inovasi, Indonesia Development Forum 2018

Jakarta, Juli 2018



PENDAHULUAN

PEMBANGUNAN bukanlah tugas dan tanggung jawab Pemerintah saja, melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab **semua komponen** termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.



TUJUAN

**PERENCANAAN
PEMBANGUNAN**
harus dapat
mengakomodir
**PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN** yang
berasal dari Dunia
Usaha dan
Masyarakat, guna:



mengoptimalkan sinergisitas peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan daerah.



meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah.

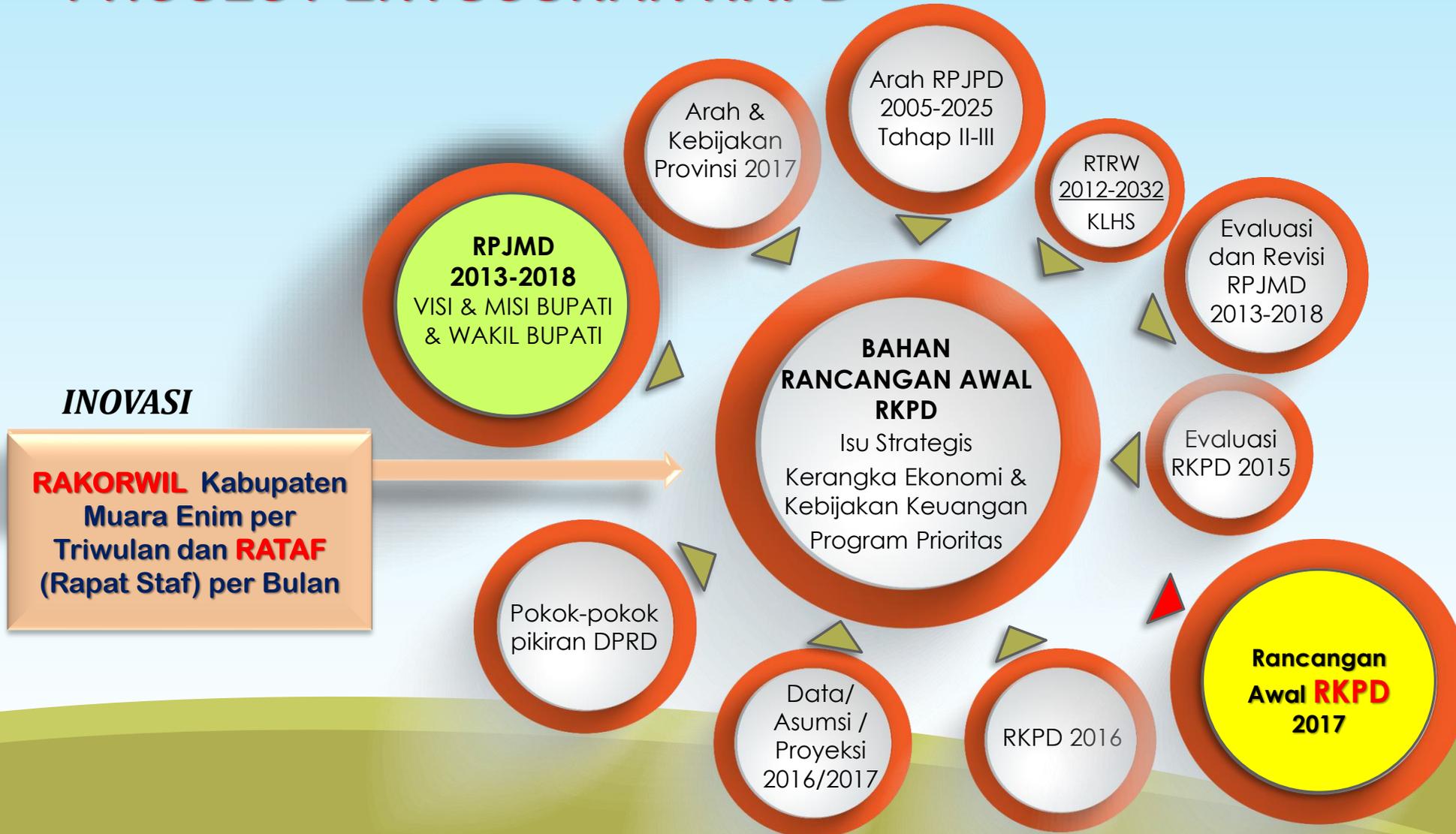


menata pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam suatu perencanaan pembangunan yang terintegrasi.



dapat menginventarisasi aset hasil pembangunan secara akuntabel.

INOVASI PROSES PENYUSUNAN RKPD



INOVASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD



INOVASI

KEBIJAKAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ANGGARAN PEMERINTAH

APBN
224,53 Milyar
(DD & Sektoral)

APBD PROVINSI
SUMSEL
(89 Milyar)

APBD
KABUPATEN
MUARA ENIM
(2,272 Trilyun)

ANGGARAN DUNIA USAHA

PROGRAM
GERBANG
SERASAN
(38 Milyar)

FORUM CSR-PKBL
KABUPATEN
MUARA ENIM
(110 Milyar)

INVESTASI
SWASTA
(0,9 Trilyun)

ANGGARAN MASYAKARAT

HIBAH LAHAN
(12 Milyar)

DANA
PENDUKUNG
PROGRAM
(9 Milyar)

**Total
Rp.3,654
Trilyun**

OUTPUT

INOVASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD



OUTCOME

INOVASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD

Meningkatnya pelaksanaan pembangunan daerah



Meningkatnya **akuntabilitas** pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah



Terintegrasinya pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN
MUARA ENIM



TERIMA KASIH

MUARA ENIM, JUNI 2018



18th ASIAN GAMES
Jakarta Palembang 2018

